

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025



Disusun Oleh :

Assad Fakhruy Syakirin

2021124442

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025

Disusun oleh :
Assad Fakhrusy Syakirin
2021124442

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno, MM., Ak., CA.
NIDN : 0021126002

Yogyakarta, 08 Agustus 2025
Dosen Pembimbing,



Yanto Darmawan, S.E., M.Sc., Ak., C.A.
NIDN : 0525017301

acc ✓
Digital
8/8
25.

Mengetahui,
Politeknik YKPN
Direktur



Prof. Dr. Kismiaji, M.Sc., Ak., C.A.
NIDN : 0524126102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi prosedur serta tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji alur dan jadwal dari prosedur penyusunan RAPBD tersebut. Laporan tugas akhir ini disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Prosedur merupakan serangkaian langkah atau tahapan sistematis yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan, prosedur berperan penting sebagai pedoman yang menjamin konsistensi, keteraturan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan RAPBD adalah proses perencanaan keuangan yang sistematis yang melibatkan identifikasi, estimasi, dan alokasi sumber daya. Proses ini mengacu pada regulasi pemerintah, salah satunya Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, efisiensi dan efektivitas belanja, serta pemanfaatan potensi pembiayaan daerah. Penelitian ini mengkaji tahapan penyusunan mulai dari RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, hingga proses penetapan RAPBD dengan DPRD. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penyusunan anggaran di BKAD Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur dan tahapan penyusunan RAPBD serta alur dan jadwal pelaksanaannya. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang bermanfaat bagi pembaca.

Kata Kunci : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kulon Progo, Prosedur, Permendagri No 15 Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji Sykur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan judul “PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025” ini dengan baik. Penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BKAD Kabupaten Kulon Progo. BKAD Kabupaten Kulon Progo beralamat di Kantor Bupati Kulon Progo, Terbah, Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (55651).

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta, juga bertujuan untuk mengamati, menarik kesimpulan, mempraktikkan kompetensi dan keterampilan yang telah penulis pelajari serta menambah pengalaman penulis dalam dunia kerja kedepannya. Selain itu penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan bagi yang bermanfaat bagi kita semua.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan atas bantuan bimbingan dan partisipasi dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
2. Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., C.A., selaku Direktur Politeknik YKPN yang telah memberikan izin dan berbagai kemudahan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dengan baik dan lancar.
3. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, MM., Ak., CA., selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta.
4. Bapak Yanto Darmawan, S.E., M.Sc., Ak., C.A, selaku Dosen Pembimbing TA & PKL yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing,

mengoreksi, memberikan saran, memberikan motivasi dan memberikan pemahaman dalam menyusun laporan.

5. Seluruh Dosen serta staf Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Politeknik YKPN Yogyakarta.
6. Orang tua dan adik yang telah memberikan restu, do'a, semangat, dukungan motivasi dan fasilitas sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik.
7. Semua teman-teman mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik YKPN yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, baik dari segi pemilihan kata, tata Bahasa, maupun dalam segi teori. Maka dari itu, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.

Kulon Progo, 08 Agustus 2025

Penulis

Assad Fakhruy Syakirin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir	2
1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir	3
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	4
2.1 Prosedur	4
2.1.1 Pengertian Prosedur	4
2.1.2 Karakteristik Prosedur	5
2.1.3 Jenis-Jenis Prosedur	6
2.1.4 Manfaat Prosedur	7
2.1.5 Tujuan Prosedur	8
2.1.6 Fungsi Prosedur	9
2.2 Administrasi	10
2.2.1 Pengertian Administrasi	10
2.2.2 Fungsi Administrasi	11
2.2.3 Ciri-ciri Administrasi	12
2.2.4 Tujuan Administrasi	13
2.2.5 Peran Administrasi	13
2.3 Anggaran	13
2.3.1 Pengertian Anggaran	13
2.3.2 Fungsi Anggaran	15
2.3.3 Penyusunan Anggaran	16

2.4 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	16
BAB III METODE PENULISAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	19
3.2.1 Subjek Penelitian.....	19
3.2.2 Objek Penelitian	19
3.3 Jenis dan Sumber Data	19
3.3.1 Jenis Data.....	19
3.3.2 Sumber Data.....	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	20
3.4.1 Observasi	20
3.4.2 Sudi Dokumentasi	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV PEMBAHASAN	22
4.1 Profil Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo	22
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kulon Progo.....	22
4.1.2 Visi dan Misi	24
4.1.3 Struktur Organisasi	25
4.1.4 Deskripsi Jabatan Pemkab Kulon Progo	26
4.2 Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024	29
4.2.1 Penyusunan RKPD KAB	30
4.2.2 Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	33
4.2.3 Penyusunan dan Penyampaian Sura Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Kepada Seluruh SKPD untuk dituangkan menjadi Dokumen RAPBD	35
4.3 Alur dan Jadwal dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).....	36
BAB V PENUTUP	38

5.1 Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi Tugas Akhir	38
5.2 Pengetahuan dan Wawasan Baru yang Diperoleh	39
DAFTAR PUSTAKA	41
DAFTAR LAMPIRAN	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Bagan Alir 4.1 Penyusunan RKPD Kab. Kulon Progo tahun anggaran 2025.....	36
Bagan Alir 4.2 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA- PPAS Kab. Kulon Progo	37
Bagan Alir 4.3 Penyusunan RKA-SKPD menjadi RAPBD Kab. Kulon Progo	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Transisi RPJMD menjadi RPD sebagai landasan penyusunanRKPD 2025 Kabupaten Kulon Progo	17
Gambar 4.1 Logo Pemkab Kulon Progo	22
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kab. Kulon Progo	26
Gambar 4.3 RPD KAB Kulon Progo T.A 2023-2026	31
Gambar 4.4 RKPD KAB Kulon Progo untuk T.A. 2025	32
Gambar 4.5 KUA Kabupaten Kulon Progo untuk T.A. 2025.....	34
Gambar 4.6 PPAS Kabupaten Kulon Progo untuk T.A. 2025.....	34

DAFTAR ISTILAH

APBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

DAFTAR ISTILAH

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat estimasi pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah.

Prosedur. Serangkaian langkah atau tahapan sistematis yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan Keuangan Daerah. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Permendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen yang memuat prioritas program dan plafon anggaran sementara untuk setiap SKPD sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun oleh setiap SKPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.